



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT SUIASA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 39395

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.562.480.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 540.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 740.000.000
3. Tanah Seluas 391 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.876.800.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1147 m2/108 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.013.880.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 6.011.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/180 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
8. Bangunan Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.580.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.446.750.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
162.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
257.400.000



3. MOBIL, HONDA MINIBUS / JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 145.170.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.800.000
5. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 2,5 G A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 853.380.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.286.939.293
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	29.411.169.293
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	29.411.169.293

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.